

Peranan Ali sadikin Dalam pembangunan Kota Jakarta Tahun 1966-1977

Paramita Widyaningrum¹, Tri Yuniarto., Djono

Abstrak

Ali Sadikin's policy in the development of Jakarta included: political sector, economic sectors, and social cultural sector. The obstacles of Ali Sadikin faced included political, economic, and social-cultural sectors. To cope with it, Ali Sadikin conducted political establishment; took some measures oriented to expense and budget aspect, controlling and improving the local government's financial capability based on the estimated situation faced; increased the number of school buildings and educators, illumination was held to the society about the importance of health for themselves and their environment, and he gave opportunity to the people who were capable of providing land and used former grave land. Some progress of Jakarta during the reign of Ali Sadikin included development, economic, and society moral sectors.

Pendahuluan

Pemerintah DKI Jakarta merupakan pemerintah daerah yang mempunyai kedudukan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. "Sebagai pintu gerbang utama, Jakarta merupakan titik pertemuan pengaruh-pengaruh sosial, politik, dan budaya dari negara-negara lain" (Gita Jaya, 1977 : 22). Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang tepat dan bijak dalam menangani Jakarta dengan segala masalah-masalahnya. Sosok pemimpin yang membawa konsep perubahan kota Jakarta kearah yang lebih baik lagi. Pada saat itu, muncul sosok Ali Sadikin yang dinilai cocok untuk memimpin kota Jakarta.

Pada waktu diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966, Ali sadikin merasa terhormat tapi tidak merasa bahagia. Ada sejumlah alasan yang menyebabkan itu, diantaranya "Iklim politik waktu itu didominasi oleh sikap curiga-mencurigai seperti yang lazim terjadi dalam suatu masa peralihan. Kemudian kekosongan dalam kepemimpinan daerah dan dualisme dalam susunan perangkat Pemerintahan, yang kesemuanya berakibat menipisnya wibawa dari Pemerintah. Sementara itu Jakarta adalah kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi tetapi

¹ email: paramita.widyaningrum@gmail.com

dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan dengan prasarana yang sangat kurang (Yayasan Idayu, 1977).

Ali Sadikin merupakan sosok temperamen yang dianggap sebagai bentuk cara untuk berdisiplin. Ali Sadikin adalah orang besar yang kontroversial kebijakannya dengan mengubah kota Jakarta menjadi kota Internasional dengan cepat, berdiri sejajar dengan kota-kota lain di dunia. Beberapa kebijakan Ali Sadikin dalam membenahi Jakarta diantaranya meliputi melegalkan perjudian, melokalisasi pelacuran, dan membuka tempat hiburan malam, guna mendapatkan pajak yang akan dimasukkan dalam APBN untuk melakukan pembangunan-pembangunan di Jakarta. Ali Sadikin adalah gubernur yang sangat berjasa dalam mengembangkan Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan yang modern. Di bawah kepemimpinannya Jakarta mengalami banyak perubahan karena proyek-proyek pembangunan buah pikiran Ali Sadikin, seperti Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, pelestarian budaya Betawi di kawasan Condet, terwujud sebagai prototipe pembangunan Jakarta.

Kajian Teori

- **Pemerintah Daerah**

Mengenai Pengertian Pemerintah Daerah, Soejito menerangkan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu *eenheidstaat* yang berarti Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* pula (1990). Dalam pemerintahan Daerah, banyak terdapat jabatan-jabatan atau *ambtenaar* jabatan. Jabatan atau *ambtenaar* pejabat ialah suatu lingkungan pekerjaan yang ditugaskan untuk waktu lama kepada pejabat atau pemangku jabatan tersebut.

Susunan pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang no. 5 tahun 1974 diantaranya adalah:

- **Kepala Daerah**

Kepala Daerah merupakan pejabat Negara. Menurut Soejito di dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian (1990).

- **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan di daerah, yang mempunyai fungsi dan tugas yang cukup berat. Menurut Sukarna (1990) memberikan pengertian mengenai badan ini yaitu adalah badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional bertugas untuk menjalankan *political control*, *legal control*, *social control*, *economic control*, *education control* dan lain-lain. Dengan kata lain DPRD adalah orang-orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat suatu daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi sebagai wakil dari masyarakat guna menyampaikan aspirasi masyarakat yang berkeinginan hidup lebih baik kedepannya.

- **Gubernur**

Gubernur adalah seseorang yang melaksanakan kebijakan daerah di tingkat provinsi atau kepala daerah otonom yang sekaligus kepala wilayah administrasi (Hanif Nurcholis, 2005: 215). Sedangkan menurut N.H.T Siahaan (2004:436) Gubernur merupakan kepala daerah tingkat I atau gubernur kepala daerah istimewa atau gubernur kepala daerah khusus ibu kota Jakarta. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Gubernur adalah merupakan kepala daerah tingkat I atau gubernur kepala daerah istimewa atau gubernur kepala daerah khusus ibu kota Jakarta seseorang yang

melaksanakan kebijakan daerah, otonom dan administrasi di tingkat provinsi.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (2004: 30) pasal 38 tugas gubernur diantaranya adalah:

- Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 memiliki tugas dan wewenang :
 - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota
 - Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota
 - Koordinasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota
- Pendanaan tugas dan wewenang gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) di bebaskan kepada APBN.
- Kedudukan keuangan gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) diatur dalam peraturan pemerintah
- Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) diatur dalam peraturan pemerintah.

Sejalan dengan beberapa uraian diatas, Ali Sadikin dalam Gita Jaya (1977:32), masalah hubungan kerja dan tata kerja antara Legislatif dan Eksekutif perlu diatur dengan sebaik-baiknya dan dimufakati bersama. Tata kerja ini sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Tata-Tertib Dewan yang telah ada. Adapun hal-hal pokok yang perlu diatur antara lain ialah mengenai hubungan kerja Gubernur Kepala Daerah/Pejabat-pejabat Eksekutif dengan DPRD serta alat-alat kelengkapannya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing. Pada dasarnya hubungan kerja ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah ditetapkan oleh Dewan bersama-sama Gubernur Kepala Daerah.

- **Kebijakan Publik**

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiardjo, 1982). Mengenai pengertian kebijakan publik, Dye dalam Agustino L (2008) mengatakan bahwa, “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan” (hlm 7). Definisi lain mengatakan bahwa, “kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud” (Carl Friedrich dalam Agustino L, 2008: 7). Dilihat dari pengertian kebijakan publik diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan publik, tidak selalu berjalan lurus sesuai yang diharapkan. Terkadang pemerintah harus menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menjalankan kebijakan tersebut, sehingga pemerintah harus bisa menentukan langkah apa yang tepat dan harus diambil untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Yang pada akhirnya kebijakan tersebut memperoleh suatu jalan dan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Berdasarkan pada kebijakan-kebijakan publik di Amerika Serikat, delapan

tipe kebijakan menurut Lester dan Stewart (2000) dalam Kusumanegara S (2010: 9-10) yaitu:

- *Kebijakan Liberal versus konservatif.* Kebijakan liberal adalah tipe kebijakan yang cenderung memanfaatkan peran pemerintah pusat (sentralisasi) dalam menciptakan perubahan sosial, biasanya untuk meningkatkan pemerataan sosial. Sedangkan kebijakan konservatif menolak peran pemerintah pusat tetapi cenderung pada desentralisasi kekuasaan dan wewenang di tingkat lokal untuk mewujudkan perubahan sosial.

Menurut Winarno (2002 : 82-84), proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dibagi menjadi empat tahap, yaitu perumusan masalah (*defining problem*), agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan.

Menurut Agustino L (2008), dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi diantaranya yaitu :

- Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa suatu kebijakan dapat mempunyai akibat yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan, atau bahkan bisa keduanya.
- Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain. Hal ini bisa disebut dengan eksternalitas atau spillover effect.
- Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada pada saat ini.
- Kebijakan dapat mempunyai dampak tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya.

Sejalan dengan beberapa uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pada awal pemerintahan Ali sadikin, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh untuk membenahi dan membangun kota Jakarta dilakukan dengan rencana-rencana yang konsepsionil serta tindakan-tindakan yang cepat dan tepat. Rencana Induk 20 tahun DKI Jakarta yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Daerah/Perda oleh DPRD adalah ketetapan yang disepakati oleh DPRD dan Gubernur KDKI. Rencana induk itulah landasan pokok yang pertama-tama ditetapkan untuk membangun Jakarta. Baik Eksekutif sebagai Badan Pelaksana maupun DPRD sebagai Badan Kontrolnya sama-sama berpegang kepada landasan itu. Sebagai Pelaksanaan selanjutnya dari Rencana Induk, maka ditetapkanlah pola Rehabilitasi 3 tahun yang disusul dengan Pelita I dan II. Dalam menjalankan pemerintahan, Ali Sadikin menjalankan tipe kebijakan Liberal dan konservatif, yakni kebijakan yang cenderung memanfaatkan peran pemerintah pusat (sentralisasi) dalam menciptakan perubahan social serta desentralisasi kekuasaan dan wewenang di tingkat lokal untuk mewujudkan perubahan.

- **Teori Pembangunan**

Menurut Moelyadi Banoewidjijo dalam Slamet Riyadi (1981), mula-mula mengartikan development sebagai kemajuan. Untuk mencapai kemajuan harus dilakukan perubahan-perubahan dan pertumbuhan yang terus menerus. Persyaratan pertumbuhan ini lebih lanjut masih dihubungkan dengan tujuan yang luas dalam pengertian development yang umumnya dimaksudkan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu menumbuhkan timbal balik tingkat pertumbuhan pendidikan, kesehatan, pendapatan masyarakat dan lain-lain.

Menurut Irma dan Cynthia dalam Slamet Riyadi (1981), hakekat

pembangunan adalah merupakan perubahan-perubahan sosial yang besar dan oleh karena sebab itu tumbuh dan berkembangnya harus bertahap untuk menghindari akses-akses yang dapat merugikan proses pembangunan itu sendiri pada tahap rintisan. Ditinjau dari tujuan-tujuannya, pembangunan adalah pengharapan akan kemajuan dalam sosial serta ekonomi, dan untuk setiap negara mempunyai pandangan maupun nilai-nilai yang berlainan mengenai apa yang dimaksud dengan pengharapan itu.

Ruang lingkup pembangunan menurut Slamet Riyadi (1981) meliputi beberapa aspek, yaitu:

- Aspek Ekonomi Dalam Pembangunan

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang pada hakikatnya adalah memenuhi peningkatan dan kualitas hidup, tidak ada jalan lain, kecuali memulainya dari perbaikan ekonomi. Akan tetapi, perubahan sosial melalui kegiatan ekonomi apabila terlalu cepat pada tahap permulaan bisa berdampak timbulnya eksese dalam keadilan sosial.

- Aspek Perencanaan Pembangunan

Dalam perencanaan pembangunan, prinsip-prinsip perencanaan secara ilmiah merupakan pedoman dan pengarahan yang sangat menentukan terhadap tujuan hakiki yang akan dicapai. Di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perencanaan telah berkembang menjadi ilmu tersendiri.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, suksesnya pembangunan Jakarta dibawah pemerintahan Ali Sadikin dibuktikan dengan adanya pembangunan-pembangunan yang dilakukan Ali Sadikin Pada saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Pembangunan-pembangunan tersebut diantaranya adalah “membangun gedung-gedung sekolah dasar yang pada saat itu sangat dirasakan kurang, perbaikan dan pemeliharaan jalan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perkotaan, fasilitas kebudayaan dan lain-lain (Ramadhan K.H. 1993:66).” Pembangunan itu merupakan hasil dari APBD yang mana salah satu sumber pendapatan dari dana APBD tersebut berasal dari pajak judi.

Kerangka pemikiran merupakan alur penalaran yang di dasarkan pada tema dan masalah penelitian, maka dapat di gambar sebagai berikut:

Pemerintah Daerah (Ali Sadikin 1966-1977)

Kebijakan Politik

Kebijakan Sosial dan Budaya

Kebijakan Ekonomi

Pembangunan Jakarta

Kemajuan Kota Jakarta

Metodologi

Dalam penelitian ilmiah diperlukan suatu metode tertentu sesuai dengan objek dan tujuan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu "Methodos" yang berarti cara atau jalan. Karena berhubungan dengan hal ilmiah, maka yang dimaksud metode yaitu cara kerja yang sistematis yang mengacu pada aturan buku yang sesuai dengan permasalahan ilmiah yang bersangkutan dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Koentjaraningrat, 1986).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode historis atau metode sejarah. Metode sejarah adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menguji dan menelitinya secara kritis mengenai peninggalan masa lampau sehingga menghasilkan suatu cerita sejarah. Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian yang harus dijalani mulai dari pengumpulan data sampai penulisan hasilnya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Hasil Penelitian

- **Sosok Pribadi Ali Sadikin**

Ali Sadikin dilahirkan di Sumedang tanggal 27 Juli 1926 dari pasangan keluarga bangsawan Sumedang, Jawa Barat. Orang tuanya seorang pegawai Dinas Pertanian/ Perkebunan di Kabupaten Sumedang (Arrohman, Trubus & Chris, 2004: 31). Ali Sadikin merupakan anak kelima dari enam bersaudara yang semuanya laki-laki. Ali Sadikin menikah dengan Nani Arnasih (almarhumah) pada tahun 1954, seorang dokter gigi, dan dikaruniai empat orang anak yang semuanya laki-laki, anak sulung lahir pada tahun 1955 diberi nama Boy Bernadi, kemudian menyusul Eddy Trisnadi (1956), Irawan Hernadi (1959), dan anak bungsu lahir pada tahun 1961 bernama Benyamin Irwansyah. Pada tahun 1986, ibu Nani Sadikin meninggal dunia, setelah beberapa lama mendapat perawatan di rumah sakit. Sepeninggal ibu Nani Sadikin, tepatnya setahun setelah wafatnya ibu Nani Sadikin, Ali Sadikin menikah lagi. Pada tahun 1987, Ali Sadikin menikahi Linda Mangan dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Yasser Umarsyah.

Karakter keras Ali Sadikin merupakan warisan dari orang tuanya yang merupakan tokoh terpandang di mata masyarakat. Ali Sadikin tumbuh bersama enam saudaranya yang semuanya merupakan anak laki-laki. Sedangkan hasil pendidikan dari orang tuanya terlihat pada sifatnya yang merakyat, peduli pada masyarakat, dan selalu mengutamakan kepentingan orang. Meskipun priyayi, orang tuanya tidak pernah memakai gelar Raden. Begitupula dengan Ali Sadikin yang tidak memakai gelar Raden karena ingin merakyat (Prayitno, Harja & Timu, 2004).

Kelebihan Ali Sadikin adalah kemampuannya yang tidak hanya memusatkan perhatian pada masalah-masalah pemerintahan kota Jakarta saja, akan tetapi pada seluruh permasalahan kehidupan di ibukota republik Indonesia. Ali Sadikin terus-menerus selama dua kali masa jabatannya memberikan perhatian penuh pada berbagai masalah, keperluan, kesulitan, dan sebagainya, baik yang bersifat kepentingan umum maupun kepentingan nasional, serta memperhatikan pribadi-pribadi anggota masyarakat, dan juga meliputi kehidupan seni dan budaya, pendidikan, olah raga, dan berbagai hal lain yang biasanya luput dari perhatian pejabat-pejabat tinggi pemerintah, yang membatasi diri pada tugasnya saja.

- **Kiprah Ali Sadikin Dalam Politik**

- Bidang Militer

Sebelum Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, karier suksesnya diawali di bidang kemiliteran, yakni sebagai Perwira TN-AL. Sejak tahun 1959 hingga 1977, jabatan yang pernah dipegang adalah Pembantu utama Menteri / Panglima Angkatan Laut tahun 1959-1963, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja sekaligus Menteri Koordinator Kompartemen Maritim / Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan pada tahun 1963-1966, dan terakhir menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1966-1977 selama 11 tahun.

- Gubernur

Pada tanggal 28 April 1966, Ali Sadikin secara resmi dilantik oleh Presiden Soekarno di Istana Negara sebagai Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Pada saat itu Ali Sadikin mengenakan pakaian resmi sebagai Mayor Jendral KKO, dengan warna serba putih (Prayitno, Harja & Timu, 2004).

Ketika menjabat sebagai gubernur, pekataan dan tindakan Ali Sadikin sering mengejutkan para staf atau aparatnya. Selain itu, Ali Sadikin juga dikenal sebagai pribadi yang paling mudah meledak emosinya tetapi teguh pada prinsipnya. Tidak peduli terhadap siapapun, meskipun itu para pejabat atasannya. Sifat-sifat khas yang melekat dalam diri Ali Sadikin, tidak mengurangi bobot kepribadian dan kesetiaan kepada tugas yang diembannya.

- **Strategi Kebijakan Ali Sadikin dalam Pembangunan Kota Jakarta**
 - Politik

Pada saat Ali Sadikin menerima jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta tanggal 28 April 1966, kondisi kota Jakarta dalam keadaan yang kurang baik karena dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam, yaitu birokrasi Pemerintah Daerah, sedangkan faktor dari luar yaitu kurangnya tanggung jawab masyarakat untuk ikut serta dalam pemeliharaan dan pengembangan kota. Pada waktu itu susunan organisasi pemerintah daerah, kondisi kepegawaian dan tata kerjanya tidak memungkinkan untuk menangani masalah-masalah besar yang dihadapi Ibukota Negara ini. Selain itu, kondisi sosial politik pada waktu itu kurang mendukung usaha pengikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan kota.

Ali Sadikin telah menggariskan satu paket kebijaksanaan yang diarahkan untuk menata kembali peran pemerintahan kota, penyelamatan sarana kota dan pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kotanya. Menurut Ali Sadikin dalam Gita Jaya (1977), usaha penataan kembali perangkat pemerintah kota tersebut ditempuh melalui berbagai tahap yang terdiri dari : Pertama, memperbaiki iklim hubungan kerja antara perangkat eksekutif dengan DPRD. Langkah ini perlu untuk menjamin mewujudkan tanggung jawab bersama antara unsur eksekutif dan DPRD agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan. Kedua, perombakan susunan organisasi pemerintahan daerah melalui langkah-langkah penataan kembali susunan perangkat pemerintahan daerah. Dalam hal ini termasuk langkah-langkah ke arah peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan di luar perangkat pemerintah daerah. Ketiga, penggarapan pemerintah daerah. Bagian ini sangat penting, karena seringnya perubahan, pemecahan dan penyatuan berbagai departemen di tingkat pusat telah membawa pengaruh terhadap pembagian tugas di antara dinas-dinas daerah maupun instansi vertikal dan perangkat pemerintah lainnya yang cakupan wilayah kerjanya di daerah. Keempat, memberikan kesatuan arah bagi perangkat pemerintah daerah disamping usaha peningkatan kemampuan, juga disusun kerangka kerja yang terencana berdasarkan program. Kelima, memberikan perhatian jaminan atas kepastian hukum para pegawainya, jenjang karier, jenjang kepangkatan, sistem prestasi dan norma-norma kepegawaian yang baik lainnya, perlu ditegakkan. Hal ini penting untuk memungkinkan para pegawai dapat bekerja tenang dan penuh tanggung jawab di bidang pekerjaannya.

- Ekonomi

Dalam menjalankan program pembangunannya, Ali Sadikin menemukan kendala dalam masalah keuangan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, anggaran belanja kota Jakarta pada waktu itu hanya 66 juta pertahunnya. Sepertiga dari pemasukan daerah, dan dua pertiga dari subsidi pemerintah pusat. Beberapa bulan kemudian anggaran itu naik menjadi 266 juta, akan tetapi jumlah itu tak sebanding dengan kebutuhan-kebutuhan pembiayaan yang

seharusnya tersedia untuk penanganan sarana dan fasilitas-fasilitas perkotaan yang rata-rata terabaikan pada saat itu.

Menurut Ali Sadikin dalam Gita Jaya (1977), cara-cara untuk meningkatkan pendapatan daerah ditempuh dengan jalan intensifikasi penggalian sumber-sumber baru sesuai dengan hak-hak otonomi daerah. Ali Sadikin mempelajari dengan seksama ketentuan yang berlaku untuk memobilisir dana-dana yang ada di daerah sesuai dengan kewenangan yang ada. Pada hakekatnya, sumber pendapatan bagi daerah dapat dibagi-bagi menjadi dua kelompok penerimaan, yaitu penerimaan-penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan penerimaan pemerintah daerah sendiri. Penerimaan dari pusat meliputi subsidi penerimaan keuangan antara pusat dan daerah; iuran pembangunan daerah (IPEDA); bantuan-bantuan program pembangunan (Proyek Inpres); penerimaan-penerimaan lain dari negara. Sedangkan penerimaan dari daerah sendiri meliputi pajak daerah, yaitu pajak-pajak yang berdasarkan wewenang yang diberikan oleh perundang-undangan yang berlaku diadakan dan dipungut oleh pemerintah daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tanggal 22 Mei 1957, tentang peraturan umum pajak daerah.

Dalam pembangunan ekonomi terdapat kebijakan-kebijakan Ali Sadikin yang cukup kontroversial, diantaranya yaitu :

- Melegalisasi Perjudian Liar

Salah satu kebijakan Ali Sadikin yang sangat berani selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah kebijakan menggali sumber pendapatan untuk pembangunan kota Jakarta dari sektor perjudian. Ali Sadikin melegalkan perjudian karena hasil-hasil dari pajak judi akan dimanfaatkan sebagai salah satu pendapatan daerah.

Pada masa jabatan Ali Sadikin tahun 60-an, usaha-usaha yang dikatakan maksiat itu sangat tidak menarik hati orang, sehingga mendapat banyak tentangan. Dalam membuat keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, Ali Sadikin tidak pernah meminta pengarahannya dari atasannya, termasuk pada waktu memutuskan untuk melegalisasi perjudian di seluruh wilayah Jakarta, Ali Sadikin mengambil kebijakan sendiri (Prayitno, Harja & Timu, 2004).

Menurut Ali Sadikin dalam Irawan dkk (2008), untuk menghindari penyimpangan terhadap kebijakan tersebut, Ali Sadikin melakukan beberapa hal, antara lain dengan membentuk tim pengawas yang mengawasi aspek sosial-politik dan retribusi yang diatur lewat SK Gubernur DKI Jakarta. Agar kebijakan ini dapat berjalan, maka hal-hal lain yang dilakukan adalah transparansi menyangkut seluruh penerimaan daerah dari pajak judi yang dimasukkan dalam kelompok penerimaan khusus dalam APBD. Dalam hal ini, para anggota DPRD bisa mengontrol ke mana dana hasil perjudian itu dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, sosial mental dan kerohanian, serta infrastruktur.

- Melokalisasi Pelacuran dan Pembukaan Tempat Hiburan Malam

Kebijakan lain Ali Sadikin yang tidak kalah kontroversial adalah melokalisasi pelacuran di Kramat Tunggak. Sudah beberapa kali Ali Sadikin mengadakan peninjauan mendadak ke daerah-daerah “pasar wanita”, ke daerah “P” yang paling ramai di sepanjang Kramat Raya dan Senen untuk mengumpulkan data yang benar. Pada waktu itu, pemberantasan pelacuran memang masalah yang sangat sulit. Pekerjaan itu sudah menjadi mata

pencaharian mereka. Tapi Pemda DKI tidak dapat membenarkan atau mendiadakan perbuatan yang asosial itu dilakukan di tempat-tempat ramai dan tempat-tempat terbuka. Melihat keadaan seperti itu, Ali Sadikin mengemukakan secara terbuka untuk menertibkan keadaan yang mencolok tersebut (Ramadhan K.H, 2012).

Selain melokalisasi pelacuran di Kramat Tunggak, Ali Sadikin juga membuka tempat hiburan malam. Ali Sadikin mengatakan upaya itu sebagai bagian dari melayani masyarakat. Karena itu, Ali Sadikin berani membuka judi, steambath, dan klub-klub, terutama untuk orang asing yang habis bekerja tidak langsung pulang, melainkan pergi ke klub untuk minum kopi setelah itu baru pulang. Pembukaan klub-klub itu dilakukan untuk melayani masyarakat kelompok ini.

- Sosial dan Budaya

- Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan

Menurut Prayitno, Harja & Timu (2004), pada masa awal memegang jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta, salah satu perhatian utama Ali Sadikin adalah masalah pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan.

Menurut Ali Sadikin dalam Gita Jaya (1977), kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ialah penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan pendidikan sekolah lanjutan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam praktiknya, pelaksanaan di daerah sulit untuk memisahkan antara tugas penyelenggaraan pendidikan tingkat SD dengan tingkat SLP, SLA dan Akademi. Masalahnya saling berkaitan antara satu sama lain.

Ali Sadikin mengambil langkah-langkah yang konkret, antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh bantuan pengadaan guru.

Salah satu usaha mencapai keadilan sosial adalah dengan menciptakan kesempatan bagi setiap warga untuk memperoleh derajat pelayanan kesehatan yang layak. Maka dari itu, diadakan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan yang meliputi 2 segi, yaitu kesehatan pribadi seseorang dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya, kedua segi tersebut harus dilaksanakan secara terpadu (Gita Jaya, 1977).

- Pembinaan untuk meningkatkan apresiasi kebudayaan dan kesenian

Dalam rangka terus melakukan pembinaan yang intensif terhadap kesenian dan kebudayaan, langkah yang diambil Ali Sadikin dalam Gita Jaya (1977), yaitu membangun Pusat Kesenian Jakarta (PKJ), yang kemudian berganti nama menjadi Taman Ismail Marzuki (TIM) pada tahun 1968. Pembangunan Taman Ismail Marzuki bertujuan untuk menampung kegiatan kesenian masyarakat serta kegiatan Dewan Kesenian Jakarta. Pengelolaan gedung ini diserahkan pada Lembaga Taman Ismail Marzuki, sedangkan Pemerintah DKI Jakarta hanya membina dan mengawasi serta memberikan subsidi sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Dengan adanya Taman Ismail Marzuki masyarakat akan dapat menyaksikan dan sekaligus mengikuti perkembangan kegiatan kesenian dan dapat juga digunakan sebagai tempat rekreasi.

- Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga

Masalah olahraga, Ali Sadikin telah menempatkan dalam deretan program utama pembangunan di DKI Jakarta, baik yang menyangkut

kegiatan fisik maupun non fisik. Pada awal tahun 1967 masalah pokok yang dihadapi Ali Sadikin meliputi masalah-masalah organisasi, sarana fisik, pengadaan peralatan olah raga, dan pembinaan/pengembangan kegiatan olah raga di kalangan warga kota. Langkah pertama yang Ali Sadikin lakukan adalah penyempurnaan organisasi pelayanan di bidang olah raga dalam tubuh pemerintah DKI Jakarta.

- **Kendala-Kendala Pembangunan Jakarta pada Masa Pemerintahan Ali Sadikin**

- Politik

Kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara dengan sendirinya membawa konsekuensi penempatan Jakarta sebagai pusat kegiatan politik di Indonesia. Seperti kegiatan partai-partai politik, Golongan Karya, Organisasi Massa, mass-media dan berbagai gerakan yang berlingkup nasional secara langsung sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Jakarta. Jakarta pada masa-masa yang lalu selalu digunakan sebagai basis kekuatan politik berbagai golongan di Jakarta, sehingga pengaruh ideologi terasa lebih tajam karena langsung dibina oleh tokoh-tokoh politik tingkat nasional. Kedudukan Jakarta sebagai pusat kegiatan niaga dan industri juga membawa pengaruh dalam kehidupan politik. Selanjutnya perluasan dan perkembangan perindustrian yang sangat pesat di DKI Jakarta merupakan potensi bagi timbulnya masalah (Gita Jaya, 1977). Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka dilakukan adanya pembinaan politik.

- Ekonomi

Keadaan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta pada saat Ali Sadikin memasuki masa jabatan sebagai gubernur tidak terlepas dari kondisi seperti itu. Ditambah dengan situasi moneter negara yang sedang dilanda inflasi. Pemerintah pusat pada saat itu baru mengambil tindakan-tindakan memerangi inflasi tersebut. Kemelut ini tercermin dalam keadaan keuangan pemerintah DKI Jakarta.

Ali Sadikin mengambil langkah yang berorientasi kepada segi pembiayaan dan anggaran. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tidak hanya berdasarkan kemungkinan perkiraan pendapatan yang akan diterima, tetapi lebih didasarkan kepada inventarisasi permasalahan yang mendesak yang perlu ditangani segera sesuai urutan prioritasnya. Dengan cara demikian, dibutuhkan dana pembiayaan yang tidak sedikit, yang tidak mungkin diperoleh hanya dengan mengandalkan sumber-sumber dana (resources) yang telah dikenal sebelumnya. Maka dari itu, pajak-pajak yang sudah ada harus diintensifkan dan disempurnakan administrasinya. Disamping itu, Ali Sadikin harus mencari dan menggali sumber-sumber baru untuk mendapatkan biaya guna menutup kekurangan tersebut (Ramadhan K.H, 2012). Sumber-sumber baru tersebut diantaranya dengan melegalkan judi, melokalisasi pelacuran di kramat tunggak dan pembukaan tempat hiburan malam. Dari tempat-tempat tersebut, Ali Sadikin melakukan penarikan pajak yang diprioritaskan untuk pembangunan Jakarta.

Berkenaan dengan kebijakan Ali Sadikin mengenai legalisasi perjudian, lokalisasi pelacuran kramat tunggak dan pembukaan tempat hiburan malam guna mendapatkan anggaran dana, Ali Sadikin mendapat kecaman dari beberapa pihak ormas. Diantaranya para ulama dan delegasi KAWI, yang menganggap kebijakan tersebut bertentangan dengan norma keagamaan norma sosial.

- Sosial dan Budaya

- 1) Pendidikan

Kebijakan Ali Sadikin di bidang pendidikan yang diarahkan pada keseimbangan penyediaan dan pelayanan kebutuhan sarana pendidikan baik untuk SD, SLP maupun SLA telah menimbulkan masalah. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan, maka kebutuhan akan gedung sekolah dan tenaga pendidik juga semakin meningkat. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, usaha yang ditempuh Ali Sadikin antara lain menyediakan gedung-gedung sekolah dan menambah jumlah pendidik.

-) Kesehatan

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kendala-kendala kembali muncul seiring bertambahnya peningkatan pelayanan kesehatan. Diantaranya meliputi kurangnya pasokan darah, kenakalan remaja seperti pecandu narkoba, adanya penyakit menular, serta masalah hygiene perusahaan dan pencemaran di Jakarta.

Untuk mengatasi masalah kekurangan darah, Ali Sadikin menempuh kebijakan antara lain dengan: mengukuhkan berdirinya perhimpunan donor darah Jakarta dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus meningkatkan jumlah donor darah sesuai dengan SK gubernur DKI Jakarta tanggal 12 Juni 1975 No. D.III-3567/a/8/1975 tentang pembentukan perkumpulan donor darah di Jakarta.

Untuk menanggulangi masalah korban narkoba, pemerintah DKI Jakarta mengambil langkah-langkah antara lain dengan melakukan pencegahan melalui bimbingan individu dan kelompok, khususnya bimbingan keluarga dan kelompok remaja melalui lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi masyarakat yang telah ada. Selain itu, pemerintah mengadakan usaha rehabilitasi korban narkoba di RS. Fatmawati Cilandak. Pada tahun 1973, Ali Sadikin memprakarsai pendirian wisma "Pamardhi Siwi" sebagai sarana perawatan/rehabilitasi korban narkoba atau anak-anak nakal, baik dari hasil razia maupun titipan dari orang tua para korban narkoba.

Adapun kegiatan pemberantasan penyakit menular dilakukan dengan menurunkan tingkat penularan melalui rehydrations centre dengan menambah jumlah rumah sakit yang akan merawat penderita. Disamping itu, pemerintah meningkatkan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada masyarakat serta peningkatan kesehatan lingkungan.

Untuk mengatasi masalah hygiene (kesehatan) perusahaan dan pencemaran di Jakarta, telah diadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga riset nasional dengan mengumpulkan data-data perusahaan dan klasifikasinya, jumlah kendaraan yang mencemari udara serta pengambilan sampel-sampel air untuk dilakukan pengujian.

-) Pembinaan untuk meningkatkan apresiasi kebudayaan dan kesenian

Masalah yang dihadapi Ali Sadikin dalam upaya meningkatkan apresiasi kebudayaan dan kesenian adalah mengenai museum-museum di Jakarta yang kurang terawat dan industri perfilman yang kurang mendapat perhatian. Maka dari itu, langkah yang diambil Ali Sadikin adalah pendirian museum dan pemugaran bangunan bersejarah serta

menjadikan film Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

-) Pembinaan dan Pengembangan kegiatan olahraga

Masalah pokok yang dihadapi Ali Sadikin dalam pembinaan dan pengembangan olahraga pada awal tahun 1967 meliputi masalah organisasi, sarana fisik, masalah pengadaan peralatan olahraga.

Langkah pertama yang diambil Ali Sadikin adalah penyempurnaan organisasi pelayanan di bidang olahraga dalam tubuh pemerintah DKI Jakarta, dengan membentuk Dinas Olah Raga DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah No. 18 tahun 1972. Selain itu, dilakukan usaha-usaha rehabilitasi terhadap sarana olahraga, yang pada waktu itu kurang terawat dan tidak berfungsi lagi.

5. Kemajuan Kota Jakarta pada Masa Pemerintahan Ali Sadikin

a) Bidang pembangunan

Ali Sadikin adalah gubernur yang sangat berjasa dalam mengembangkan Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan yang modern. Di bawah kepemimpinannya Jakarta mengalami banyak perubahan karena proyek-proyek pembangunan buah pikiran Ali Sadikin. Beberapa proyek pembangunan pada masa Ali Sadikin diantaranya seperti : Proyek MHT, Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, pelestarian budaya Betawi di kawasan Condet.

b) Perekonomian

Didalam pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi di Jakarta, Ali Sadikin mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang ada sesuai dengan potensinya. Sektor-sektor ekonomi utama di Jakarta adalah perdagangan, perindustrian, dan jasa pertanian dalam arti luas. Sektor-sektor ini menyumbang sekitar 70% dari Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta. Termasuk didalamnya antara lain, perdagangan besar dan eceran, jasa, industri, penanaman modal, lembaga-lembaga keuangan, pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan (Gita Jaya, 1977).

- **Moral Masyarakat**

Dalam membentuk dan membina moral masyarakat, Langkah yang diambil Ali Sadikin yaitu dengan melakukan pembinaan dan peningkatan pelayanan di bidang keagamaan. Ali Sadikin berpendapat, bahwa tugas-tugas pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dengan masalah pembinaan keagamaan. Oleh karena itu, program pembinaan agama dicantumkan juga dalam program kerja Pemerintah DKI Jakarta dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.

Kesimpulan

Pada awal pemerintahan Ali sadikin, Jakarta merupakan kota yang belum tertata dengan baik. Ali sadikin mulai merencanakan kebijakan yang akan dijalankan untuk melakukan penataan di berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang politik, konomi dan sosial budaya. Dalam bidang politik yaitu dengan memperbaiki iklim hubungan kerja antara perangkat eksekutif dengan DPRD dan perombakan susunan organisasi pemerintahan daerah. Bidang ekonomi dilakukan dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui pemasukan sumber-sumber baru sesuai dengan hak-hak otonomi daerah. Sedangkan dalam bidang sosial budaya dengan meningkatkan kualitas

pendidikan dan kesehatan, pembinaan untuk meningkatkan apresiasi kebudayaan dan kesenian, serta pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga.

Setelah penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, Jakarta mulai mengalami perubahan yang sangat pesat. Usaha penataan kembali susunan perangkat pemerintahan daerah serta pejabatnya telah berhasil dilaksanakan. Dengan kebijakan ekonomi yang dilakukan Ali Sadikin, perekonomian pemerintah DKI Jakarta mengalami kemajuan dan peningkatan yang sebagian besar berasal dari sektor perdagangan, perindustrian, dan jasa pertanian dalam arti luas. Sektor-sektor ini menyumbang sekitar 70% dari *Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB)* DKI Jakarta. Dengan adanya peningkatan perekonomian, pemerintah DKI dapat melakukan perbaikan dan pembangunan di Jakarta, yaitu dengan membangun sarana pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesenian, serta olahraga.

Kemajuan kota Jakarta pada masa pemerintahan Jakarta dalam bidang Pembangunan yaitu meliputi Proyek MHT, Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol, pelestarian budaya Betawi di kawasan Condet. kemajuan dalam sektor Perekonomian dapat dilihat dari kemajuan yang dicapai oleh sektor-sektor ekonomi terlihat dari angka-angka yang menunjukkan bahwa perusahaan kecil, menengah dan besar telah meningkat jumlahnya, dari sekitar 36.000 pada tahun 1969 menjadi 65.000 pada tahun 1975 dan 79.964 pada akhir tahun 1976. Pendapatan domestik regional bruto DKI telah meningkat dengan pesat, dari Rp. 28,565 milyar pada tahun 1966 menjadi Rp. 555,866 milyar pada tahun 1973 dan Rp. 1.049,116 milyar pada tahun 1975. Untuk memperbaiki moral masyarakat DKI Jakarta yang hidup semakin modern sejalan dengan kemajuan zaman, diwujudkan melalui peningkatan penyelenggaraan pengajian, pembinaan rohani, MTQ, kesenian-kesenian yang bercorak keagamaan seperti rebana, qasidah, paduan suara gerejani dan lain sebagainya.

Saran

- Bagi Mahasiswa

Sebagai mahasiswa calon pendidik sejarah, sosok Ali Sadikin merupakan tokoh yang pantas untuk dipelajari berkenaan dengan gaya Ali Sadikin dalam memimpin Jakarta dan kebijakan-kebijakannya yang cukup berani untuk melakukan perubahan di DKI Jakarta ke arah yang lebih baik. Melalui penelitian ini mahasiswa akan mengetahui tentang peranan Ali Sadikin dalam melakukan pembangunan di Jakarta dengan membandingkan Jakarta sebelum dan sesudah kepemimpinan Ali Sadikin yang dapat dilihat dalam buku Gita Jaya, yang berjudul Catatan H. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977 terbitan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 1977.

- Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai langkah awal penelitian lebih lanjut dalam mempelajari tentang peranan Ali Sadikin sebagai gubernur DKI Jakarta dalam membangun kota Jakarta menjadi kota yang sejajar dengan kota-kota maju lainnya. Hal-hal yang terkait dengan Ali Sadikin seperti perkembangan Jakarta sebelum dan sesudah pemerintahan Ali Sadikin perlu diulas lebih dalam lagi.

- Bagi Pemerintah DKI Jakarta

Penelitian ini dapat menjadi referensi pemerintah DKI untuk mencontoh kepemimpinan Ali Sadikin yang tegas dan berani dalam memajukan DKI Jakarta menjadi kota yang berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Kemajuan

ini dibuktikan dengan adanya pembangunan-pembangunan di segala bidang kehidupan, meliputi bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial-budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Jaya, G. 1977. Catatan Ali sadikin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977. Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Prayitno, A., Harja, T.R.P.,Timu, C.S.K. 2004. Ali sadikin Visi dan Perjuangan sebagai Guru Bangsa. Jakarta: Universitas Trisakti-Jakarta.

Ramadhan, K.H. 1993. Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ramadhan K. H. (1995). Pers Bertanya Ali Sadikin Menjawab. Jakarta: Pustaka Jaya.

Ramadhan K. H (2012). Ali Sadikin Membenahi Jakarta Menjadi Kota Yang Manusiawi. Jakarta: Ufuk Press.

Sadikin, Ali. 1995.Tantangan Demokrasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

